

# 2014, Pemerintah akan Tarik Pinjaman Proyek MRT Rp 3 T

Oleh: Agustiyantri dan Wahyu Sudoyo

► **JAKARTA** – Pemerintah berencana menarik pinjaman untuk proyek *mass rapid transit* (MRT) di atas Rp 3 triliun pada 2014. Sedangkan tahun ini pemerintah menurunkan penarikan pinjaman yang dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk proyek tersebut menjadi Rp 1,8 triliun dari rencana awal Rp 3,06 triliun.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedi Priatna menuturkan, pemerintah menurunkan penarikan pinjaman proyek MRT sebesar Rp 1,2 triliun dikarenakan adanya keterlambatan dalam proses pengerjaan. "Rencananya untuk hibah dari pemerintah pusat ke Pemprov DKI itu anggarannya selesai di 2014, tapi memang tergantung pada kesiapan proyek. Kalau ada keterlambatan, bisa diafihkan ke 2015," jelas dia di Jakarta, akhir pekan lalu.

Pemerintah, sambung dia, sebenarnya berencana menyelesaikan penerus hibahan pinjaman proyek untuk Pemprov DKI Jakarta itu pada 2014. Namun, hal itu akan mundur dari rencana semula, lalu akan selesai ditarik secara keseluruhan pada 2016 mendatang. "Rencananya seluruh penarikan pinjaman untuk proyek MRT sudah dilakukan pada 2016 dengan total pinjaman sekitar Rp 15 triliun," ujar Dedi.

Dari total pinjaman proyek MRT tersebut, lanjutnya, telah disepakati besaran investasi yang akan dibiayai pemerintah pusat sebesar 49% melalui hibah dan 51% pendanaan proyek akan dibiayai oleh Pemprov DKI Jakarta melalui penerusan pinjaman proyek. "Jadi nanti setelah hibah 49% dari pemerintah selesai, baru dibiayai menggunakan pinjaman proyek DKI Jakarta sendiri," tandas dia.



Hatta Rajasa

Sementara itu, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brojonegoro menuturkan, dalam rencana belanja tahun anggaran 2014, salah satu fokus utama pemerintah adalah perbaikan angkutan umum perkotaan. Karena itu, pemerintah berencana menaikkan anggaran belanja untuk perbaikan angkutan umum yang diminati masyarakat.

"Ada kenaikan belanja yang signifikan untuk itu, sehingga diharapkan dapat kurangi frekuensi penggunaan mobil. Belanja itu akan dibatasi untuk angkutan umum yang diminati masyarakat," jelas dia.

**Pangkas Birokrasi**

Di sisi lain, pemerintah dan Pemprov DKI Jakarta berjanji memangkas bi-

rokrasi proyek monorel supaya bisa mencapai target operasional pada 2016. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, kedua pihak telah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan proyek transportasi tersebut.

"Itu dilakukan agar pelaksana proyek bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak kembali terhambat seperti pada 2008 lalu," ungkapnya dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kembali antara PT Jakarta Monorel dengan para perusahaan pemegang saham proyek monorel di Balaikota, Jakarta, akhir pekan lalu.

Penghentian proyek monorel pada saat itu karena direksi PT Jakarta Monorel terlibat kasus korupsi. Namun, proyek itu kembali dilanjutkan setelah ada pergantian direksi dan komitmen bantuan modal dari pemerintah pusat hingga 51%.

Menurut Hatta, proyek monorel merupakan harapan dari seluruh warga Jakarta dan juga bangsa Indonesia untuk mewujudkan transportasi massal yang lebih baik. Pembangunan transportasi massal yang cepat ini dinilai penting mengingat pengguna kendaraan pribadi di Jakarta dan sekitarnya semakin banyak dan menjadi biang kemacetan.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berharap pembangunan proyek ini bisa lebih dipercepat kurang dari tiga tahun karena ada pemangkasan proses birokrasi. Dengan demikian salah satu kendala transportasi massal warga Jakarta diyakini akan bisa teratasi.

Jokowi juga berharap, kehadiran monorel yang segera disusul dengan pembangunan MRT akan membuat sistem transportasi massal di Jakarta bisa setara dengan transportasi massal di kota-kota besar dunia lainnya. "Setelah MRT, kami mendorong agar jalur monorel Bekasi-Jakarta menuju bandara segera dimulai. Kalau bisa, tahun ini, karena semua bisa dikerjakan dan lahannya sudah siap," tandas dia.